

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)**

(Skripsi)

Oleh

Asy Syuaroh

1511031024



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

**THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE TAX
AVOIDANCE**
*(Empirical Study On Consumer Goods Industry Companies Listed on the
Indonesia Stock Exchange In 2016-2020)*

By

Asy Syuaroh

This study aims to examine the effect of the corporate governance on tax avoidance. This study focused on consumer goods industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. This research is motivated by the phenomena about tax avoidance. Corporate governance in this study uses proxy of the institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and the audit quality as independent variables. The dependent variable is the tax avoidance measured using the cash effective tax rate (CETR) companies are paying taxes divided by income before income taxes. The sample in this study were 148 obtained from the purposive sampling method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. From these results it can be seen that the audit committee has a significant negative effect on tax avoidance. Institutional ownership and the audit quality has no significant effect on tax avoidance, while the independent board of commissioners has positive effect on tax avoidance.

Keywords: Corporate Governance, Tax Avoidance

ABSTRAK

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Oleh

Asy Syuaroh

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang penghindaran pajak. *Corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai variabel independen. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak yang di ukur dengan *cash effective tax rate (CETR)* perusahaan yaitu pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Jumlah pengamatan sebanyak 148 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Corporate Governance*, Penghindaran Pajak

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)**

Oleh

Asy Syuaroh

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

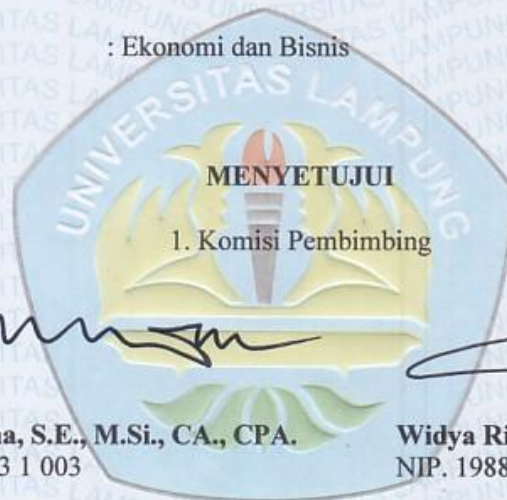
Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)**

Nama Mahasiswa : **Asy Syuaroh**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031024

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.
NIP. 19560620 198603 1 003

Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.
NIP. 19881124 201504 2 004

1.
2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19751026 200212 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.**

Sekretaris : **Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA.**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Juni 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asy Syuaroh

NPM : 1511031024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK** (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)" telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri. Tidak menjiplak hasil karya orang lain dan belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Penulis



Asy Syuaroh

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Wonodadi, 02 Juni 1997 dengan nama lengkap Asy Syuaroh dan merupakan anak ke-lima dari pasangan Bapak Bakran dan Ibu Poniem. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Gadingrejo Pringsewu pada tahun 2012, setelah itu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi ROIS Fakultas Ekonomi dan Bisnis di awal perkuliahan. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pekondoh Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan”

(Q.S. Ar-Rahmaan : 13)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“Apa yang benar-benar diperhitungkan adalah akhir yang baik, bukan awal yang buruk.”

(Ibnu Tamiyah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Segala puji hanya milik Allah subhanahuwata'ala semata karena atas kehendak dan segala nikmatnya yang telah diberikan, hingga terselesaikannya skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Kupersembahkan karya sederhana yang disertai dengan perjuangan ini kepada : **Kedua orangtuaku tercinta** Almarhum Bapak Bakran dan Ibu PoniyeM sebagai tanda bakti dan wujud terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang, do'a yang tulus, pengorbanan, dukungan dan perhatian serta didikannya untuk keberhasilan putri bungsunya.

Keempat Kakakku Junaedi, Nur Hasanah, Dwi Komaria, dan Moh. Rusdi Amin yang selalu setia mendukung, memotivasi, dan mendo'akan.

Seluruh keluarga besar, sahabat, dan orang-orang yang menyayangiku yang selalu memberikan semangat tiada henti, Terimakasih atas do'a dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta dorongan dari semua pihak dan penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penguji utama atas masukan, saran dan motivasi yang diberikan.

5. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku pembimbing I atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing II atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Susi, S.E., MBA., PhD., Akt. selaku pembimbing akademik atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Kelurgaku tercinta Almarhum Bapak Bakran dan Ibu PoniyeM, Kakak kandungku Junaedi, Nur Hasanah, Dwi Komaria, dan Moh. Rusdi Amin beserta Kakak ipar dan keponakan terimakasih untuk do'a, kasih sayang, motivasi, bantuan dan perhatiannya serta masukan yang membangun untuk kehidupan saya yang lebih baik lagi.
11. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 yang telah berproses bersama.
12. Teman-teman UKMF Rois Feb Unila yang telah memberikan hal-hal positif dan semangat melakukan kebaikan.
13. Sahabat-sahabatku tercinta semasa kuliah, Renny septiyaningsih, Eri Mar'atus Sholiha, Marta Tila, dan Reni Safitri.
14. Ligo Squad Group dengan Ustadzah Umi Nurza, dan teman-teman selingkar tarbiyah Isnaeni Mei Saputri, Nur Hafifah, Pramitha Yulia, Nova Astisa, Syarifah 'Aini, Ani

Asriyah, Elsyia Junia Kirana, Suci Indah Lestari, Nanda Nuzuliza, Novalia, Atikah Nur Hidayah dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman yang telah diberikan serta dukungan dan motivasinya.

15. Archery Squad Gadingrejo Umi Herna, Anis Dwi Saputri, Kak Desi, Kak Sulis, Meli, Sarah dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman yang telah diberikan serta dukungan dan motivasinya.

16. KKN squad Desa Pekondoh Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Oka Pujiyanto, Rialdi, Suci Prischayani, Tara Lovia, Hanif Irfan Fauzi, dan Meliyanti. Terimakasih atas pengalaman yang telah diberikan selama menjalankan masa tugas mengabdikan untuk masyarakat di Desa Pekondoh Cukuh Balak.

15. Dan almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Penulis,

Asy Syuaroh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.1.2 Penghindaran Pajak	13
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.3.1 Kepemilikan Institusional	16
2.1.3.2 Komisaris Independen	16

2.1.3.2 Komite Audit	17
2.1.3.2 Kualitas Audit	18
2.1.4 Ukuran Perusahaan	18
2.1.4 Profitabilitas	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Penelitian	22
2.4 Pengembangan Hipotesis	23
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	23
2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak..	24
2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	25
2.4.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Populasi dan Sampel	27
3.2 Data Penelitian	28
3.2.1 Jenis dan Sumber Data	28
3.2.2 Metode Pengumpulan Data	29
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	29
3.3.1 Penghindaran Pajak	29
3.3.2 Kepemilikan Institusional.....	30
3.3.3 Komisaris Independen	31
3.3.4 Komite Audit.....	31
3.3.5 Kualitas Audit.....	32
3.3.6 Ukuran Perusahaan.....	32
3.3.7 Profitabilitas	33
3.4 Model Analisis Data	33
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	33
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	33
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	34
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	34
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	35
3.4.2.4 Uji Autokorelasi.....	35
3.4.3 Analisis Regresi Berganda	36
3.4.4 Pengujian Hipotesis	37
3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi	37
3.4.4.2 Uji F/Uji Kelayakan Model	38
3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	40
4.2 Analisis Data	41
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	45
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	45
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	46
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	47
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	48
4.2.3 Hasil Uji Linear Berganda.....	49
4.2.4 Uji Hipotesis.....	51
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi	51
4.2.4.2 Uji F/Uji Kelayakan Model	52
4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	53
4.3 Pembahasan	55
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	55
4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak..	56
4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	58
4.3.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Pemilihan Sampel Penelitian	28
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian	40
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot	45
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
Gambar 4.3 Latar Belakang Pendidikan Komisaris Independen	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Tabel Daftar Sampel Perusahaan Tahun 2016-2020
- Lampiran 2.** Tabel Hasil Perhitungan Variabel Independen dan Dependen Tahun 2016- 2020
- Lampiran 3.** Tabel Daftar Perusahaan yang di *Outlier*
- Lampiran 4.** Tabel Daftar Perusahaan Setelah *Outlier*
- Lampiran 5.** Persentase Rata-Rata Komisaris Independen Dengan Latar Belakang Pendidikan Keuangan dan Akuntansi
- Lampiran 6.** Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 7.** Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 8.** Hasil Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wajib pajak yang taat pada peraturan perpajakan merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain menjalankan kewajiban dengan baik, wajib pajak yang patuh dapat berperan secara aktif dalam meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan tabel 1.1 data realisasi penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan pada tahun 2016 sampai 2020 memperlihatkan bahwa total pendapatan negara Indonesia yang diperoleh melalui sektor pajak terealisasi lebih dari 80% setiap tahun. Besarnya realisasi penerimaan pajak tersebut menjadi potensi bagi Negara dalam membantu pembangunan nasional di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Apabila setiap wajib pajak badan selalu taat, patuh dan disiplin untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyetor pajak maka pendapatan negara akan meningkat, dengan itu target pemerintah dalam sektor pajak dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak berlawanan dengan tujuan

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.539	1.283	1.424	1.577,6	1,198,8
Realisasi	1.283	1.147	1.315,9	1.332,1	1.019,56
Persentase (%)	83,4	89,4	92,4	84,4	85,65

Sumber: www.kemenkeu.go.id

perusahaan sebagai wajib pajak, yaitu untuk memaksimalkan hasil keuntungan dan meminimalkan beban yang dikeluarkan yaitu terkait dengan beban pajak yang harus dibayar. Maka dari itu pada kenyataannya, penghindaran pajak sebagai salah satu hambatan pemerintah dalam memperoleh hasil pajak dengan maksimal.

Pohan (2013) menyebutkan makna penghindaran pajak yaitu usaha menghindari kewajiban yang dijalankan secara sah serta terlindung untuk warga Negara sebab tidak berlawanan oleh ketentuan pajak, dimana strategi dan teknik yang digunakan umumnya akan memanfaatkan kekurangan yang terkandung dalam peraturan dan pedoman dalam meminimalisir total pajak yang harus dibayar. Manajemen (*agent*) lebih unggul dalam mengetahui informasi kinerja keuangan perusahaan dibandingkan pemilik (*principal*). Praktik penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan mengenai informasi perusahaan membuat manajemen lebih agresif terhadap laba perusahaan. Manajemen perusahaan meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, menyebabkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Dengan demikian, permasalahan penghindaran pajak menjadi masalah yang unik dan kompleks karena dari satu

sudut pandang penghindaran pajak tidak mengabaikan undang-undang, namun disisi lain penghindaran tersebut tidak dikehendaki oleh pemerintah (Putu dan Agung, 2016)

Terdapat contoh penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, pertama yaitu kasus Dirjen pajak menggugat perusahaan Multi Sarana Avindo atas dugaan perpindahan kuasa yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, dan oleh Dirjen pajak dinyatakan bersalah dalam majelis peradilan. Terdapat perbedaan antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kasus PT Multi Sarana Avindo (MSA) salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak selanjutnya ditemukan di perusahaan Coca-cola Indonesia. Diduga PT Coca cola Indonesia melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan kurangnya jumlah pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Dirjen pajak mendapati suatu *cost* fiktif yang menggelembung di tenggak 2002 sampai 2004, dan tahun 2006. Besarnya biaya beban menimbulkan kurangnya penghasilan kena pajak, sehingga setoran pajak menurun. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari periode tahun 2002-2006.

Kasus penghindaran pajak yang ketiga terjadi pada perusahaan IKEA. Perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga ini diketahui melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 miliar terjadi dalam kurun

waktu 2009 hingga 2014. IKEA melakukan pergeseran laba, atau memindahkan miliaran euro laba dari negara-negara berpajak tinggi ke anak perusahaan atau penerima-penerima lain di negara-negara dengan pajak rendah atau bahkan tidak ada. Perusahaan membebankan biaya royalti dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisi pajak secara keseluruhan. IKEA melakukan penghindaran pajak \$13 juta di UK, \$29 juta di France, dan \$39 juta di Germany

Dari kasus tersebut dapat menjelaskan bahwa walaupun penghindaran pajak secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak adalah sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara dan akan menghambat proses pembangunan nasional (*pajak.go.id*).

Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *corporate governance* merupakan kerangka kerja untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan diharapkan mampu menanggulangi *agency problem*. Masalah agensi ini timbul karena

asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. antara kepentingan investor dan agen. Kondisi itu bisa menimbulkan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Keberadaan kepemilikan oleh investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja *insider* (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal, dengan semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, lebih penting pula kualitas kontrol manajer agar tidak bertindak oportunistik dalam mengambil keputusan sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Fadhilah (2014) menyebutkan bahwa investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi celah terjadinya penghindaran pajak. Mulyani (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) menemukan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan dengan memotivasi terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan adil dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Komisaris independen dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja untuk mengontrol dan mengevaluasi puncak manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Komisaris independen mengharapkan manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang baik agar mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan

cost agency akibat dari tindakan oportunistik manajer. Dewi (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Putu dan Agung (2016) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut BEI, komite audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Fungsi utamanya adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, *risk management*, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik bagi perusahaan, ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak. Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berelasi dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari, 2003). Penemuan yang diteliti oleh Puspita dan Harto (2014) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh Sarra (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut FCGI (*Forum for Corporates Governance in Indonesia*) transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Peningkatan transparansi terhadap perusahaan dalam perpajakan semakin dituntut oleh publik yang beranggapan

adanya perilaku pajak yang agresif (Rosalita dan Ayu, 2016). Dalam memenuhi ekspektasi investor dan pemegang kepentingan lainnya, perusahaan dengan kualitas audit yang baik diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparansi. Penelitian Sandy dan Lukviarman (2008) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini ialah replikasi dari penemuan yang dilakukan oleh Putu dan Agung (2015) dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel independen kualitas audit. Dengan alasan bahwa ada banyak penelitian tentang *corporate governance* dengan komponen variabel yang berbeda untuk mendeteksi adanya aktivitas penghindaran pajak. Peneliti akan meneliti apakah *corporate governance* dengan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit mempunyai pengaruh atau tidak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Pertimbangan peneliti memilih perusahaan industri barang konsumsi karena perusahaan pada sektor ini cenderung berkembang secara terus menerus dalam tingkat penjualannya yang memungkinkan perusahaan mendapatkan *profit* yang makin tinggi sehingga jumlah pajak yang dibayar pula akan jauh lebih signifikan. Oleh sebab itu, penyeteroran pajak yang tinggi bisa memicu perusahaan menjurus

dengan menekan biaya pada penyetoran pajaknya dan melakukan penghindaran pajak. Berlandaskan pemaparan tersebut dan penelitian terdahulu yang memberikan hasil berbeda-beda. Peneliti termotivasi untuk melaksanakan pengamatan yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang dan konsumsi tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang dan konsumsi tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang dan konsumsi tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang dan konsumsi tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan manajemen dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan yaitu penghindaran pajak.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Regulasi

Diharapkan penelitian dapat menambah informasi dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

3. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan besarnya pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan arahan kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*).

Terjadinya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini dapat menimbulkan dua permasalahan (Jensen & Meckling, 1976).

a. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka akan menambah konflik antara pemegang saham dengan manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan *agency problem*. Dalam hal informasi yang berkaitan dengan perusahaan, pihak manajemen lebih unggul daripada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan akan lebih fokus pada peningkatan nilai saham perusahaan sedangkan manajemen akan lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri yang cenderung akan mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Utami, 2013).

Adanya perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan mengenai informasi, hal tersebut yang membuat manajemen lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak, dimana praktik penghindaran pajak adalah sebuah strategi dan teknik yang

dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Seringkali metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelamahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi dan Sari 2015). Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi hal ini diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapatan negara, penghindaran pajak ini selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun cara yang digunakan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan menurut Merks (2007) dalam (Kurniasih dan Sari 2013):

- a. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara – negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (*tax haven country*) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan.
- b. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak yang paling

rendah (*formal tax planning*).

- c. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specificanti tax avoidance rule)*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

Meskipun penghindaran pajak secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. (pajak.go.id).

2.1.3 Corporate Governance

Upaya untuk mengurangi *agency problem* yang ada di perusahaan maka diperlukan suatu tata kelola yang baik dalam perusahaan. Tata kelola (*corporate governance*) adalah suatu mekanisme atau alat yang digunakan untuk menegakan prinsip pengendalian dan saling mengawasi antara pemilik perusahaan dan agen. Penerapan *corporate governance* di perusahaan diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), berikut prinsip-prinsip *corporate governance*:

- a. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *GCG*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai bentuk kepemilikan saham dari berbagai macam institusi, seperti institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dan institusi lainnya (Shien et.al, 2006). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring*. Tindakan pengawasan oleh pemilik saham institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi praktik perilaku *opportunistic* atau mementingkan kepentingan dirinya sendiri (Putri dan Yuyetta, 2013). Kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan juga semakin tinggi. Pengawasan yang tinggi akan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Keberadaan kepemilikan investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja insider (Jensen dan Meckling, 1976).

2.1.3.2 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bukan pegawai perusahaan, akan tetapi langsung berurusan dengan organisasi perusahaan tersebut. Tugas utama dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya organisasi dalam sebuah perusahaan, selain itu komisaris independen berperan sebagai penengah atau penghubung antara pemegang saham dengan agen untuk mengurangi konflik antara keduanya. Dapat dikatakan bahwa komisaris independen memiliki tugas untuk merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang

saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen diharapkan akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita and Harto, 2014).

2.1.3.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada dalam perusahaan yang terdaftar BEI, oleh karena itu perusahaan diharuskan untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata, 2014). Tugas utama dari komite audit meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan termasuk didalamnya pemeriksaan dan pengawasan pada proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit juga berkaitan erat dengan pemeriksaan terhadap risiko yang ada di perusahaan. Dengan demikian maka komite audit dapat mengurangi tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh agen dalam kaitanya terhadap tindakan penghindaran pajak.

2.1.3.4 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati , 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang sesuai dengan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal- hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010).

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Dalam pemeriksaan audit laporan keuangan perusahaan *go public*, KAP *big four* memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan berusaha bersifat transparan dan akan sulit untuk melakukan manipulasi dalam laporan keuangan (Dewi dan Sari, 2015).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Rego, 2003) dalam (Dewi & Jati, 2014).

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (Jasmine, 2017). *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.

2.2 Penelitian Terdahulu

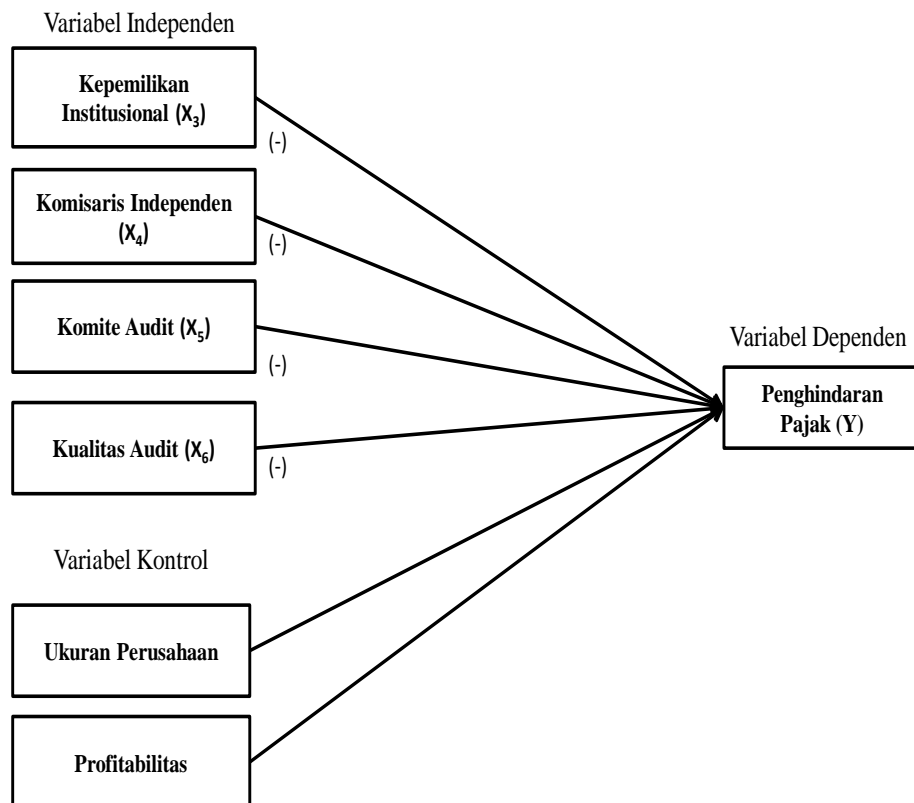
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1	Amaliyah dan Rachmawati (2019)	Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak	Dependen: Penghindaran pajak Independen: 1. Dewan Komisaris 2. Kualitas audit Kontrol: 1. <i>Size</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Growth</i>	Komisaris Independen dan Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak
2.	Praseyo dan Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen	1. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3.	Andika Yulistian (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Kualitas Audit 2. Komite Audit 3. Kepemilikan Institusional 4. Konservatisme Akuntansi	1. Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

4.	Rani (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> , Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Financial Distress</i> 3. Komite audit 2. Komisaris Independen	1. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Financial Distress</i> dan Komite Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5.	Vidayanti (2017)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, <i>Return On Assets</i> , Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Komite audit 2. Kualitas audit 3. Kepemilikan institusional 4. <i>Return On Assets</i> 5. <i>Leverage</i>	1. Komite Audit dan <i>Return On Asset</i> Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Risiko Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Putu dan Agung (2015)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Komite Audit 2. Komisaris Independen 3. Kepemilikan Institusional Kontrol: Ukuran Perusahaan	1. Komite Audit dan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Proporsi Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Fadhilah (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: 1. Kepemilikan Institusional 2. Dewan Komisaris Independen 3. Komite audit 4. Kualitas audit	1. Proporsi Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8.	Aria dan Irawan (2012)	Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	Dependen: Manajemen Pajak Independen: 1. Kompensasi Direksi 2. Kepemilikan Saham Direksi 3. <i>Corporate Governance</i> Kontrol: Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Rasio Hutang, dan Kinerja.	1. Kompensasi Kepada Direksi Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Pajak. 2. Kepemilikan Direksi Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Pajak . 3. Penerapan <i>CG</i> Mempunyai Pengaruh Positif Terhadap Manajemen Pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka dapat disajikan kerangka penelitian untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Dan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Adapun kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar. 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Keberadaan kepemilikan oleh investor-investor institusional akan mampu mengawasi kinerja *insider* (Jensen dan Meckling, 1976). Tingkat kepemilikan saham pihak institusional akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen. Berdasarkan teori hubungan antara pemilik saham dan manajemen ketika semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional maka akan membuat pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen. Tingginya kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga masalah keagenan dapat dikurangi (Winata, 2014).

Fadhilah (2014) menyebutkan bahwa investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Sehingga diharapkan kepemilikan pihak institusi dan eksternal lainnya mampu mengontrol pihak manajemen untuk tidak membuat keputusan oportunistik yang bisa merugikan perusahaan dan kepentingan lainnya serta menimbulkan biaya agensi dalam mengawasi tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak didukung oleh penelitian Fadhilah (2014) dan Mulyani (2018). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Tugas utama dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya organisasi dalam sebuah perusahaan, selain itu komisaris independen berperan sebagai penengah atau penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen untuk mengurangi konflik antara keduanya. Komisaris independen memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memastikan bahwa *corporate governance* sudah dilakukan di dalam perusahaan. Secara teori bisa dikaitkan bahwa salah satu cara mengurangi asimetri informasi bisa dengan membentuk komisaris independen yang mewakili kepentingan dari pemilik saham.

Komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama, jajaran direksi dan dewan komisaris lainnya (Rosalita dan Ayu, 2016). Komisaris independen memiliki peran yang penting untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendeteksi perilaku penyimpangan atau kecurangan manajemen. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka diharapkan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2014) dan Putu dan Agung (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut BEI, komite audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Fungsi utamanya yaitu membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Komite audit memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pengendalian internal didalam perusahaan. Sandy dan Lukviarman (2008) menyebutkan bahwa komite audit mutlak harus ada dalam perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* mengingat pentingnya tugas dari komite audit terhadap kelangsungan perusahaan. Di dalam *corporate governance* terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diungkapkan dapat di informasikan secara akuntabel. Selain itu pembentukan komite audit juga diharapkan mampu mengurangi *agency problem*.

Di dalam penelitian Pohan (2008) menjelaskan perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang sedikit cenderung bertindak lebih efisien, namun memiliki kelemahan minimnya ragam pengalaman anggota. Oleh karena itu penting memiliki komite audit yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik agar proses pemeriksaan dan pengawasan dapat berjalan baik dan mampu meminimalisir penyimpangan tindakan agresif manajemen terhadap penghindaran pajak. Dewi dan Jati (2014) di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Kualitas audit berkaitan dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Tingkat transparansi yang baik juga berdampak minat investor untuk menanamkan modal atau saham di dalam perusahaan (Winata, 2014). Peningkatan tranparansi terhadap pemegang saham dalam perpajakan semakin dituntut oleh publik yang beranggapan terhadap perilaku pajak yang agresif (Rosalita dan Ayu, 2016).

Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya (Dewi dan Sari, 2015). KAP *big four* merupakan institusi yang memiliki reputasi yang baik dalam memeriksa laporan audit. Manajemen dan perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* akan berusaha bersifat transparan dalam menyusun laporan keuangan ataupun menekan tindakan oportunistis manajemen dalam perusahaan. Sandy dan Lukviarman (2008), dan Fadhilah (2014) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah :

H4: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor perusahaan manufaktur industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang memenuhi pemilihan komponen sampel berdasarkan kriteria dibawah ini:

1. Perusahaan industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
5. Perusahaan yang memiliki nilai CETR < 1 .
6. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk variabel penelitian.

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel Penelitian

1	Perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020.	263
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020.	(4)
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah.	(1)
4	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian.	(56)
5	Perusahaan yang memiliki nilai CETR > 1	(9)
6	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk variabel penelitian.	(23)
	Jumlah Sampel Perusahaan	170

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan pada tahun 2016-2020. Data diperoleh dari situs di BEI www.idx.co.id dan website perusahaan.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Data mengenai studi pustaka diperoleh dari penelitian terdahulu dan didukung oleh literatur lainnya. Data yang berhubungan dengan variabel diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI dengan mengakses situs di BEI www.idx.co.id dan website perusahaan.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel. Variabel pertama, variabel dependen yaitu variabel dimana faktor keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Kedua, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun secara negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit. Ketiga, variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen, agar mendapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik (Hartono, 2013). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas.

3.3.1 Penghindaran Pajak

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Penghindaran pajak salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara. Menurut Dyreng *et al.* (2010) penghindaran pajak dihitung dengan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar nilai CETR mengindikasikan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam PPh Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-undang Pajak 26 Penghasilan, penghitungan PPh Badan yang terutang untuk Wajib Pajak Badan dengan bentuk badan hukum perseroan terbuka (Tbk) yaitu pada tahun pajak 2010 sampai saat ini tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 25% (pajak.go.id). Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

3.3.2 Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai bentuk kepemilikan saham dari berbagai macam institusi, seperti institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dan institusi lainnya (Shien *et.al*, 2006). Tindakan pengawasan oleh pemilik saham institusional dapat

mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi praktik perilaku *opportunistic* atau mementingkan kepentingan dirinya sendiri (Putri dan Yuyetta, 2013). (Khurana dan Moser, 2009) memperlihatkan penghitungan kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total kepemilikan saham oleh institusi}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

3.3.3 Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan wajar dengan memperhatikan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pihak manapun didalam sebuah perusahaan. Dalam penelitian (Sandy dan Lukviarman, 2008) menggunakan indikator pengukuran dengan rumus:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Jumlah anggota dewan komisaris dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan perusahaan pada bagian tata kelola perusahaan di bagian struktur dewan komisaris.

3.3.4 Komite Audit

Komite audit memiliki peran atau tugas yang penting di dalam perusahaan. Peran komite audit adalah memeriksa dan mengawasi seluruh aktivitas pada saat proses

pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sekurang-kurangnya harus memiliki 3 orang yang tergabung dalam komite audit. (Fadhilah, 2014) dalam penelitiannya mengukur variabel komite audit dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

3.3.5 Kualitas Audit

Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas audit dilakukan melalui perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *big four*. Kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*. Dengan melihat sampel perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* yaitu KPMG, *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, *Ernest & Young* dan *Deloitte Touche Tohmatsu* akan diberi nilai 1 sedangkan yang tidak akan diberi nilai 0 (Dewi and Sari, 2015).

3.3.6 Ukuran Perusahaan

Firm Size yang merupakan ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, berdasarkan Hasibuan (2009) dalam Sari, Kalbuana dan Jumadi (2016) cara yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan, diantaranya: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus ln aset seperti yang digunakan oleh Aria dan Irawan (2012) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Firm Size} = \text{LN}(\text{Total Aset})$$

3.3.7 Profitabilitas

Profitabilitas, diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets* yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013)

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

3.4 Model Analisis Data

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2016) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*) (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Dalam uji asumsi klasik beberapa uji yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan melihat grafik normal *probability plot*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *P-P Plot*. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi tidak normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini,

multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Suatu model regresi yang baik seharusnya terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik scatterplot. Sementara itu, diagram scatterplot dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat diagram scatterplot adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu y maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test) dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji autikorelasi dengan menggunakan uji DW adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai DW terletak diantara d_U dan $(4-d_U)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Jika nilai DW lebih rendah daripada d_L maka koefisien autokorelasi >0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Jika nilai DW lebih besar dari $(4-d_L)$ maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Jika nilai DW terletak antara d_U dan d_L atau DW terletak antara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Nilai d_U dan nilai d_L dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda *moderated regression analysis* (MRA). Menurut Ghozali (2016) MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Analisis regresi dilakukan dengan bantuan program SPSS. Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{Kep_Inst} + \beta_2 \text{Ko_Ind} + \beta_3 \text{Kom_Au} + \beta_4 \text{Kua_Au} + \beta_5 \text{Firm_Size} + \beta_6 \text{ROA} + e$$

Keterangan :

CETR	= Penghindaran Pajak
α	= konstanta
β	= koefisien regresi
Kep_Inst	= Variabel Kepemilikan Institusional
Ko_Ind	= Variabel Komisaris Independen
Kom_Au	= Variabel Komite Audit
Kua_Au	= Variabel Kualitas Audit
<i>Firm_Size</i>	= Variabel Ukuran Perusahaan
ROA	= Variabel Profitabilitas
ε	= <i>error</i>

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Pengujian yang digunakan dalam analisis ini adalah uji *Adjusted R Square* (Adj R²), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas. Nilai R² yang mendekati satu menunjukkan

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.4.4.2 Uji F / Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji F digunakan untuk melakukan uji H₀ dimana data empiris sesuai dengan model regresinya, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara data dengan model sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut cocok atau fit. Pengambilan keputusan uji kelayakan model adalah: (a) Jika nilai goodness of fit - statistic $> 0,05$ maka H₀ diterima yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi belum layak digunakan. (b) Jika nilai goodness of fit statistic $< 0,05$ maka H₀ ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi layak digunakan.

3.4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Penerapan uji ini didasarkan pada hipotesis nol (H₀) yang akan diuji hipotesis alternatifnya (H_a). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) maka hipotesis terdukung, yang berarti secara individual variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) maka hipotesis tidak terdukung, yang berarti secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2020. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pemegang saham institusi yang menginginkan pengembalian investasi yang besar dapat mendorong manajemen menghasilkan keuntungan yang besar dengan mengurangi pajak yang dibayarkan. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak terdukung.
2. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang bukan dari akuntansi dan keuangan cenderung memiliki wawasan yang dianggap kurang memadai terhadap ketaatan dan peraturan perpajakan perusahaan sehingga kurang memberikan kontrol yang optimal kepada manajemen perusahaan. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak terdukung.

3. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan komposisi yang telah ditetapkan, komite audit akan lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap sikap oportunistik manajer. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini terdukung.
4. Kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang laporan keuangannya di audit oleh KAP *The Big Four* maupun yang di audit oleh KAP non *The Big Four* sama-sama berkualitas sehingga tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak secara signifikan. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini tidak terdukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Nilai adjusted *R-Square* yang rendah yaitu hanya 13,6% menandakan bahwa masih banyak variabel lain yang belum digunakan yang memiliki kontribusi terhadap besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Komisaris independen memiliki hasil koefisien regresi yang positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan proksi proporsi jumlah komisaris independen.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah sampel penelitian yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun dengan jenis perusahaan yang lain seperti perusahaan di bidang *real estate* dan perbankan sehingga dapat memberi perbedaan terhadap variabel yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis industri atau perusahaan yang berbeda.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar menambah variabel independen lain seperti *Corporate Social Responsibility*, karakteristik perusahaan, kepemilikan manajerial serta lainnya dengan lebih lengkap.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan proksi lainnya jika menggunakan variabel yang sama yaitu variabel komisaris independen, sehingga bisa melihat ada atau tidaknya perubahan hasil dalam penelitian atau mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, R. and Rachmawati, N.A., 2019. Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 1(01).
- Armstrong, C. S., J.L. Blouin, A.D. Jaholiner. dan D.F. Lacker. 2015. *Corporate Governance, Incentives. and Tax Avoidance. Journal of Accounting* 2, no.3: 179-234
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Pada Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita, and Maria M Ratna Sari. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif , Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada *Tax avoidance. Jurnal Akuntansi*, no. Universitas Udayana: 50–67.
- Dewi, Noor Mita. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Vol.9 No.2*. Semarang.
- Dewi, Ni Nyoman, dan I ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax avoidance* Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Diantari, Putu Rista dan I gk Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi*. Vol.16.1.Universitas Udayana, Bali.
- Dyreg, Scott Det al., 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance Pada Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Universitas Negeri Padang.

- Feranika, Ayu. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. *Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*.
- Forumpajak.org (2016). IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak <https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/> Diakses pada tanggal 13 Juli 2019.
- Forum for *Corporate Governance* in Indonesia. 2000. *Second Position Paper for Recommendation concerning Good Corporate Governance*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah & Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 6. Yogyakarta: BPFE
- Irawan, Hendra Putra dan Farahmita, Aria. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Pada Manajemen Pajak Perusahaan. Universitas Indonesia, Depok.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Katadana.co.id (2019). Gelombang Penghindaran Pajak Dalam Pusaran Batu Bara <https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara/> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*.
- Kurniasih, Tommy., dan Sari, Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana Vol. 18*.
- Komite Kebijakan Nasional Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.

- Maharani, I Gusti Ayu C. dan Ketut Alit Suardana. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2 (2014) : 525-539.
- Mustami, Ade Adinda. Coca Cola Diduga Akali Setoran Pajak. <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/cocaCola.Diduga.Akali.Setoran.pajak.html>./Diakses pada tanggal 11 Februari 2020.
- Mulyani, Sri . 2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3. No. 1.
- Ngadiman, dan Puspitasari, C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, *Jurnal Akuntansi*, Volume Xviii, No. 03.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan: JOM Fekon, Vol. 4No.1(Februari) 20171684 Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, rasio Tobin Q, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Puspita, Slivia Ratih dan Harto, Puji. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putri, Noviantara Dwi & Yuyetta, Etna Nur Afri. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro* Vol 2.
- Rahmawati, Ayu, Endang, M.G. Wi, and Agusti, Rosalita Rachma. 2016. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Perpajakan* no. 1. *Universitas Brawijaya*.
- Rani, P., 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 6(2), pp.221-241.
- Rodriguez, E., F. and Arias., M. 2012. *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. The Chinese Economy*, Vo. 45 No.6.
- Sandy, Syeldila, and Niki Lukviarman. 2008. Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19: 85–98.

- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Sarra, Hustna Dara. 2017. Dosen Fakultas, Bisnis Universitas, Muhammadiyah, Kata Kunci, Penghindaran Pajak, and Effective Tax Rate. Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Tangerang.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. International Journal of Finance and Accounting*. Nigeria.
- Shien, et.al, 2006. *Financial Accounting Theory 3th editon*. Pearson Prentice Hall .
- Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax avoidance* , Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali ,” 2: 525–39.
- Utami, Wahyu. T., dan Setyawan, H. 2013. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Pajak Agradif dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIV*. 413–421.
- Vidiyanti, E., 2017. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institutional, Return On Assets, dan Leverage terhadap Tax Avoidance* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Widyasari, Nita Ayu, Suhadak, Achmad Husaini. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 26, No. 1: 1-11
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Universitas Kristen Petra. *Tax & Accounting Review*, VOL. 4, No.1.
- Yulistian, Andika. 2018. Pengaruh *Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*. *Riau Journal of Accounting*. Vol. 1.